

Analisis Penyebab Penolakan Hungaria terhadap Sanksi Energi Uni Eropa ke Rusia

Laras Ayu Permai¹, Mega Nisfa Makhroja¹, Valencia Husni¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRACT

The Russian-Ukrainian war received responses from various parties, including the European Union. The European Union responded by imposing sanctions on Russia. Granting this refusal is not fully approved by EU member states, especially energy sanctions. Hungary is the European Union member state that has been the most vocal in rejecting sanctions against Russia. This act of refusal is certainly an interesting issue to study, regarding what is behind Hungary's resistance to energy sanctions or what factors Hungary has more priority in this case than supporting the context at the European Union level. This type of qualitative research helps the writer describe the results of this research. Using knife analysis in the form of rational choice theory and the concept of energy security helps the author find answers regarding the factors that influence Hungary's threat to energy sanctions.

Keywords: *Russian-Ukrainian War, Energy Sanctions, Refusal of Sanctions, Hungary, European Union.*

ABSTRAK

Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa merespon dengan memberikan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi ini tidak sepenuhnya disetujui oleh negara anggota Uni Eropa, terutama sanksi energi. Hungaria menjadi negara anggota Uni Eropa yang paling vokal menolak sanksi energi terhadap Rusia. Penolakan Hungaria tersebut tentu menjadi isu yang menarik untuk diteliti, terkait apa yang melatarbelakangi penolakan Hungaria terhadap sanksi energi atau apa yang sedang diprioritaskan Hungaria dalam kasus

ini dibandingkan dengan mendukung konsensus di tingkat Uni Eropa. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk membantu penulis menguraikan hasil penelitian tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan eksplanatif. Pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori *rational choice* dan konsep keamanan energi. Teori dan konsep tersebut membantu penulis menemukan jawaban terkait faktor yang mempengaruhi penolakan Hungaria terhadap sanksi energi.

Kata Kunci: Perang Rusia-Ukraina, Sanksi Energi, Penolakan Sanksi, Hungaria, Uni Eropa

PENDAHULUAN

Negara Hungaria adalah salah satu negara anggota Uni Eropa yang terletak di kawasan Eropa Tengah. Hungaria merupakan salah satu negara yang tidak memiliki wilayah laut atau negara *landlocked*. Hungaria berbatasan dengan wilayah Slovakia di bagian utara, Slovenia dan Austria di bagian barat, Serbia, Kroasia, dan Rumania di bagian selatan, serta Ukraina di bagian timur (Geologinesia, 2020). Di kawasan Eropa, Uni Eropa adalah sebuah organisasi regional yang terpendang paling berhasil dari organisasi regional lainnya. Keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah anggota Uni Eropa yang telah mencapai angka 27 negara anggota setelah peristiwa Britain Exit atau Brexit (*Uni Eropa*, 2018).

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria terpantau aktif dalam pembuatan kebijakan di tingkat Uni Eropa. Utamanya dalam proses penentuan dan penetapan sanksi Uni Eropa terhadap konflik yang terjadi di wilayah perbatasannya, yakni konflik bersenjata atau perang antara negara Rusia dan Ukraina (*EU Sanctions against Russia Explained*, 2023). Sepanjang tahun 2022 stabilitas kawasan Eropa terlihat mengalami instabilitas kawasan yang diakibatkan oleh perang Rusia dan Ukraina tersebut. Perang yang terjadi merupakan akibat dari adanya perbedaan kepentingan antar kedua negara (“Alasan Rusia Ingin Menyerang Ukraina,” 2022). Perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian global, khususnya terhadap stabilitas kawasan Eropa. Secara langsung perang tersebut memberikan dampak di berbagai sektor dalam internal Uni Eropa, misalnya berdampak pada sektor keamanan energi, ekonomi dan perdagangan, pengungsi, hingga sektor politik. Sedangkan dampak yang dirasakan Hungaria selaku bagian dari Uni Eropa adalah terancamnya pasokan energi Hungaria yang diakibatkan memburuknya hubungan Uni Eropa dan Rusia akibat perang yang terjadi. Hubungan yang buruk tersebut memicu kedua pihak mengeluarkan kebijakan yang merugikan Hungaria. Contohnya, berupa pemberian sanksi energi Uni Eropa ke Rusia yang berdampak pada gangguan pasokan energi Hungaria.

Perang tersebut mendorong berbagai pihak seperti Uni Eropa memberikan tindakan tegas. Tindakan yang dilakukan Uni Eropa adalah menetapkan sanksi terhadap Rusia. Dalam hubungan internasional sanksi didefinisikan sebagai sebuah alat yang digunakan aktor negara atau non-negara untuk mempengaruhi atau menghukum negara lain (Ismail, 2016). Politik internasional kontemporer menunjukkan tujuan sanksi dalam beberapa kasus mulai bergeser dan hanya bersifat sebagai formalitas saja, tujuannya adalah untuk melakukan intervensi terkait proses pembuatan kebijakan di negara *target* (Ismail, 2016). Sanksi biasanya terkait dengan ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan sanksi juga ada dalam ranah konsekuensi diplomatik atau militer. Barry Kolodkin, seorang pakar hubungan Amerika Serikat di Eropa Timur

berpendapat bahwa meskipun sanksi selama ini menjadi salah satu alat diplomatik, namun tingkat keberhasilannya hanya sebanyak 30% (Kolodkin, 2019). Persentase tersebut menunjukkan pemberian sanksi sebenarnya tidak efektif, terutama pemberian sanksi dalam jangka waktu yang panjang, sebab negara penerima sanksi sejatinya akan terus belajar untuk mengatasi sanksi.

Uni Eropa memberikan serangkaian sanksi ke Rusia atas serangan yang dilakukan, di antaranya terdapat sanksi di bidang energi Rusia. Hungaria pada kondisi ini mengalami situasi yang dilematis sebagai negara anggota Uni Eropa, yakni dilema antara menjadi negara anggota yang mendukung konsensus di tingkat Uni Eropa atau menjadi negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Situasi ini menarik untuk dilihat lebih jauh lagi terkait bagaimana dan mengapa negara memilih tindakan dalam situasi yang dilematis tersebut. Kondisi ini terjawab dengan penolakan yang dilakukan Hungaria. Sehingga, tulisan ini berfokus dalam menemukan jawaban terkait apa yang mendasari tindakan penolakan Hungaria terhadap sanksi energi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini menggunakan tiga referensi sebagai bahan pendukung rampungnya penelitian dalam tulisan ini. Pertama tulisan dari *Hasanuddin Journal of International Affairs* dengan judul “Pengaruh Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina” yang ditulis oleh Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, Muhammad Ashry Sallatu pada volume 2, No. 1, di bulan Februari tahun 2022 (Massaguni et al., 2022). Artikel jurnal tersebut membahas hubungan antara Uni Eropa dengan Rusia yang semakin renggang karena terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta membahas dampak sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa ke Rusia. Sanksi tersebut berdampak pada kerugian ekonomi Rusia yang dibuktikan dengan terjadinya gangguan stabilitas ekonomi. Dampak lainnya tentu adalah terganggunya hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Rusia. Namun, dampak-dampak tersebut tidak dapat melumpuhkan tindakan Rusia.

Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan tulisan ini terletak pada fokus pembahasan. Massaguni dkk. membahas tentang sejauh mana dampak yang dirasakan Rusia akibat sanksi yang diberikan Uni Eropa atas krisis Ukraina saat aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014 silam. Sedangkan penulis membahas tentang penyebab penolakan Hungaria dalam penetapan sanksi energi Uni Eropa terhadap konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022. Keterkaitan antar kedua tulisan ini adalah pada tulisan Massaguni terdapat pembahasan terkait dampak yang dirasakan Uni Eropa selaku pemberi sanksi. Sanksi yang diberikan Uni Eropa menjadi bumerang bagi Uni Eropa. Atas adanya ketergantungan terhadap Rusia, negara anggota Uni Eropa memandang tindakan Uni Eropa tersebut adalah sebuah keputusan yang memiliki perspektif ganda, sehingga negara anggota Uni Eropa terpecah menjadi dua kelompok dalam menyikapi sanksi tersebut, tentu dengan berdasarkan perbedaan pendapat dan kepentingan antar setiap negara anggota. Kelompok pertama adalah kelompok yang mendukung penerapan sanksi tegas terhadap Rusia, dengan tujuan menghentikan tindakan Rusia terhadap Ukraina. Kelompok kedua adalah kelompok yang kontra dengan sanksi yang ditetapkan karena adanya ketergantungan terhadap energi Rusia. Kelompok negara ini adalah Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, Hungaria, Yunani, Siprus, Belgia, Italia, Malta, Luksemburg, dan Austria.

Literatur kedua adalah tulisan pada *Journal of European Integration* yang berjudul “*The Domestic Challenge to EU Foreign Policy-Making: From Europeanisation to deEuropeanisation?*” pada Volume 43, No. 5, halaman 519–534 yang ditulis oleh Patrick Müller, Karolina Pomorska,

dan Ben Tonra pada tahun 2021 (Müller et al., 2021). Pada tulisan ini para penulis memiliki fokus pembahasan tentang tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa belakangan ini yang kerap kali merujuk pada kasus de eropanisasi. Müller dkk. menjabarkan definisi de eropanisasi yang merupakan sebuah realitas kontemporer menggambarkan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan negara anggota tertentu.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah pada lingkup pembahasannya. Muller dkk. menjelaskan secara mendalam terkait tantangan kebijakan luar negeri Uni Eropa dengan adanya de eropanisasi yang semakin marak terjadi belakangan ini. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait dengan penyebab penolakan Hungaria dalam penetapan sanksi energi Uni Eropa terhadap Rusia. Keterkaitan kedua tulisan ini adalah penulis melihat respon Hungaria dalam menolak sanksi energi yang ditetapkan Uni Eropa adalah bagian dari apa yang Muller dkk. jelaskan dalam tulisannya, yaitu situasi yang dijelaskan sebagai de eropanisasi, di mana Hungaria melihat kebijakan terkait sanksi energi tersebut tidak mengakomodir kepentingan negaranya.

Literatur ketiga adalah sebuah *handbook* yang berjudul *Energy Governance in Hungary*, ditulis oleh John Szabo, Csaba Weiner, dan Andra's Dea'k yang dipublikasikan oleh Springer Nature Switzerland AG pada tahun 2021 (Szabo et al., 2021). Tulisan tersebut membahas tentang tata kelola energi negara Hungaria. Energi disebut sebagai kunci utama yang menghubungkan Hungaria dengan negara-negara non-liberal seperti Rusia. Teori ketergantungan sangat *relate* untuk menggambarkan Hungaria yang selalu memastikan keamanan suplai energi karena keterbatasan produksi yang dimiliki. Kondisi tersebut mengarahkan Hungaria untuk membentuk hubungan rumit dengan negara pengekspor sumber daya seperti Rusia.

Perbedaan kedua tulisan ini adalah tulisan Szabo dkk. membahas secara lengkap terkait dengan penggunaan dan ketergantungan energi yang dialami Hungaria terhadap Rusia serta membahas agenda transisi energi di Hungaria yang dicanangkan oleh Uni Eropa untuk menghentikan ketergantungan energi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyebab penolakan Hungaria dalam penetapan sanksi energi Uni Eropa ke Rusia. Keterkaitan kedua tulisan ini adalah penulis melihat tulisan Szabo dkk. memiliki tema pembahasan yang sama terkait energi serta bagaimana keamanan dan ketergantungan energi di Hungaria menjadi salah satu isu utama yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, tulisan Szabo dkk. memberikan sumbangan pemikiran untuk menjadi jawaban atas penelitian yang dilakukan penulis.

METODE PENELITIAN

Tulisan adalah penelitian kualitatif, Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berkaitan dengan data yang bukan angka, melainkan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya naratif (Sugiyono, 2020). Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif penulis dapat mengurai dan menjabarkan topik masalah tulisan ini secara mendalam dan mudah dipahami. Sedangkan, pendekatan penelitian tulisan ini adalah pendekatan studi kasus dari Creswell. Pendekatan studi kasus adalah sebuah pendekatan yang menelaah tentang sebuah kasus tertentu dalam *setting*

kehidupan nyata kontemporer, penulis dalam pendekatan ini melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, kemudian penulis melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Salmaa, 2023). Selain pendekatan studi kasus, penulis dibantu dengan adanya pendekatan eksplanatif untuk menemukan dan memahami alasan Hungaria dalam menentukan pilihannya dalam kasus ini. Mengingat pendekatan eksplanatif digunakan dalam menjelaskan hal-hal di balik fenomena yang terjadi atau untuk mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi (Fahmy, 2023).

Tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumen. Dengan teknik pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder karena penulis menggunakan berbagai literatur yang didapatkan di internet untuk menjadi sumber data dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis data dilakukan penulis saat proses pengumpulan data berlangsung dan menggunakan proses analisis data dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa proses dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data jenuh. Miles dan Huberman pun mengklasifikasikan analisis data kualitatif ke dalam 4 langkah, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. (Sugiyono, 2020)

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI PILIHAN RASIONAL (*RATIONAL CHOICE*)

Teori pilihan rasional atau *rational choice theory* (RCT) adalah sebuah teori yang awalnya dikenal sebagai paradigma utama dalam ilmu ekonomi (Ogu, 2013). Awalnya RCT adalah sebuah teori untuk memahami dan memodelkan perilaku sosial dan ekonomi seorang individu. RCT pertama kali dipopulerkan oleh peraih *Nobel Memorial Prize Laureate in Economics Science*, Gary Becker sekitar tahun 1992 silam. RCT mendefinisikan bahwa rasionalitas berarti bahwa seorang individu bertindak seolah-olah menyeimbangkan biaya dengan manfaat yang didapatkan, guna memaksimalkan keuntungan pribadi. Menurut Elster, esensi RCT adalah ketika individu dihadapkan dengan beberapa pilihan maka ia akan melakukan apa yang diyakini akan memiliki hasil keseluruhan yang terbaik.

Salah satu keutamaan atau kekuatan RCT adalah keumumannya. RCT memiliki set asumsi yang berkaitan dengan setiap jenis aktor dalam keadaan tertentu dan tentang latar lingkungan apa pun, termasuk negara (Ogu, 2013). Pada politik internasional, negara merupakan aktor yang memainkan peran dengan kepentingan yang berbeda-beda. Negara memainkan perannya dalam berinteraksi dengan negara lain menggunakan kebijakan luar negeri yang merepresentasikan kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, pada lingkup politik RCT sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis tindakan yang seharusnya dipilih sebuah negara apabila dihadapkan dengan berbagai pilihan, terutama dalam kondisi terdesak.

Interaksi yang dilakukan oleh antar negara serta tindakan atau kebijakan yang ditentukan setiap aktor negara pasti memiliki alasan yang dapat dipahami melalui analisis RCT. Pada referensi tulisan lainnya juga kerap menggunakan RCT sebagai pisau analisis untuk memahami

tindakan suatu negara (Rinayuhani, 2017). Pendekatan ini memberikan sebuah gambaran untuk mengetahui perilaku manusia atau aktor dalam menentukan pilihannya, yaitu dengan mengetahui apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dari aktor yang bersangkutan (*involved*). Aktor didefinisikan sebagai makhluk rasional yang selalu memiliki tujuan dalam perilaku atau tindakannya (*goal-seeking* atau *goal-oriented*). Tujuan-tujuan tersebut merupakan suatu hal yang dianggap sebagai kepentingan yang hendak dicapai dalam situasi keterbatasan sumber daya (*resource restraint*). Oleh karena itu, pendekatan pilihan rasional mendefinisikan bahwa rasionalitas berarti bahwa seorang individu bertindak dengan menyeimbangkan antara biaya dan manfaat yang akan didapatkan, guna memaksimalkan keuntungan pribadi (Budiardjo, 2008).

KONSEP KEAMANAN ENERGI

Pasca perang dingin keamanan energi mulai menjadi isu yang menarik perhatian politik internasional dan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negeri setiap negara. International Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan energi sebagai kondisi cukupnya ketersediaan energi secara terus menerus dengan harga yang terjangkau (*Energy Security Ensuring the Uninterrupted Availability of Energy Sources at an Affordable Price*, n.d.). Eskalasi konflik dan ancaman yang terjadi di dunia internasional secara dominan dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan kepentingan menjadi salah satu pemicu terjadinya dinamika harga energi. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu ancaman keamanan energi bagi pengimpor energi di dunia, contohnya bagi negara-negara Uni Eropa. Pada awalnya konsep keamanan energi hanya mencakup komponen-komponen ekonomi politik, namun pada perkembangannya keamanan energi kemudian mencakup keamanan insani (Ramadhani, 2017).

Sebuah buku berjudul "*EU Energy Security in the gas sector: Evolving Dynamic, Policy Dilemmas and Prospect*" yang ditulis oleh Fillipos Proedrou menjabarkan bahwa keamanan energi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang negara pengimpor dan negara pengekspor energi. Keamanan energi menurut negara pengimpor adalah sebuah kondisi negaranya tidak mengalami kekurangan pasokan energi dan dapat terus menerus memenuhi kebutuhannya dengan biaya yang tidak berlebih dan aman bagi lingkungan. Berbeda halnya dengan negara pengekspor, baginya keamanan energi adalah ketika keamanan energi setara dengan keamanan permintaan, tentunya dengan adanya harga yang kompetitif dan mampu menjamin keuntungan serta tidak mengeluarkan biaya yang boros terhadap lingkungan (Ramadhani, 2017).

Dinamika harga energi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi perekonomian suatu negara bahkan dunia dalam jangka waktu pendek atau pun dalam jangka waktu panjang. Mengingat energi adalah elemen penggerak perekonomian. Kerentanan ekonomi jangka pendek terjadi apabila negara hanya memiliki satu sumber energi sehingga akan mempersulit negara untuk beralih dari energi tersebut (Ramadhani, 2017). Pada posisi ini negara akan terpaksa bertahan dengan ancaman harga energi yang semakin lama semakin tinggi. Kerentanan energi jangka panjang adalah kondisi negara tidak mampu meningkatkan fleksibilitas untuk menggunakan sumber energi lain bahkan negara tersebut terancam tidak mampu menemukan sumber energi alternatif. Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari keamanan nasional. Sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan pasokan energi untuk mendukung perekonomian negaranya sebagai sebuah upaya memberikan kesejahteraan

bagi kehidupan rakyatnya. Mengacu pada sudut pandang negara pengimpor, keamanan energi difokuskan pada akses terhadap sumber energi (*access to resources*) dan keamanan terhadap pasokan energi (*energy security of supply*). Hal tersebut berarti bahwa keamanan energi sebuah negara ditentukan oleh suplai dari negara lain (Ramadhani, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA RELASI UNI EROPA-RUSIA PASCA PENYERANGAN RUSIA KE UKRAINA

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memberikan ancaman sekaligus tekanan bagi Uni Eropa. Kedekatan Uni Eropa dan Ukraina mendorong Uni Eropa untuk berpihak pada Ukraina dan menentang Rusia. Pada website resmi Dewan Uni Eropa dan Dewan Eropa, secara jelas Uni Eropa menyatakan bahwa Uni Eropa mengutuk keras agresi militer Rusia dan memberikan peringatan. Ketika peringatan Uni Eropa tidak diindahkan Rusia, Uni Eropa kemudian secara aktif menetapkan berbagai macam sanksi terhadap Rusia. Meski sebelumnya Uni Eropa telah terbilang aktif menetapkan dan memperbaharui sanksi terhadap Rusia sejak tahun 2014 dalam merespon aneksasi Krimea oleh Rusia. Uni Eropa sangat aktif menetapkan sanksi terhadap Rusia sepanjang tahun 2022, dimulai sejak tanggal 24 Februari 2022 saat Rusia memulai serangannya. Uni Eropa telah menetapkan 9 paket sanksi untuk Rusia, salah satunya adalah sanksi energi. Dari 9 paket sanksi, 6 di antaranya menyinggung terkait sanksi energi, yakni pada paket sanksi kedua, keempat, kelima, keenam, kedelapan, dan kesembilan. Secara umum sanksi energi tersebut menyinggung terkait larangan memasok energi batu bara dan minyak dari Rusia, memberlakukan pembatasan harga terkait transportasi laut minyak Rusia, melarang ekspor barang dan teknologi di sektor penyulingan minyak ke Rusia, dan melarang investasi baru di bidang energi dan pertambangan Rusia (*EU Response to Russia's Invasion of Ukraine*, 2023). Sanksi-sanksi tersebut yang kemudian mendapat penolakan keras dari Hungaria.

Penolakan Hungaria terhadap Sanksi Energi

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria turut aktif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan di tingkat Uni Eropa melalui Dewan Uni Eropa ataupun Dewan Menteri. Kontribusi Hungaria melalui perwakilan-perwakilan tersebut mewakili Hungaria dalam menyuarakan kepentingan nasionalnya. Terutama pada kebijakan Uni Eropa dalam merespon perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sejak adanya wacana dan penetapan sanksi energi untuk Rusia, Hungaria menjadi negara yang paling vokal menolak diberlakukannya sanksi tersebut. Kebijakan luar negeri Hungaria menunjukkan bahwa Hungaria berada pada posisi menolak menyetujui sanksi dalam bentuk apapun pada energi Rusia. Berbagai pernyataan yang diungkapkan aktor pemerintah Hungaria menegaskan keengganan Hungaria menyetujui sanksi tersebut. Pada berbagai kesempatan, sejumlah tokoh Hungaria seperti perdana menteri, menteri luar negeri, menteri keuangan, serta sejumlah staf perdana menteri Hungaria menyuarakan penolakan terhadap sanksi energi Uni Eropa terhadap Rusia.

Sebagai negara, Hungaria memahami pilihan yang paling tepat dipilih adalah menolak sanksi. Penolakan tersebut adalah tindakan yang dipilih secara rasional, yakni saat Hungaria mempertimbangkan besaran keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan apabila menerima sanksi. Menerima sanksi energi bagi Hungaria hanya akan memperburuk keadaan ekonomi dan mengancam keamanan energi negaranya yang merupakan bagian salah satu bagian vital dari

keamanan nasional. Dampaknya berupa terputusnya Hungaria dengan akses pasokan energinya. Menemukan kembali sumber energi yang baru adalah sebuah masalah yang sulit untuk diselesaikan Hungaria dalam waktu yang singkat dan dana yang terbatas.

Sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Hungaria pada berbagai kesempatan mengungkapkan pernyataan dan tindakan penolakan terhadap sanksi energi. Pada pertengahan bulan Maret, melalui Perdana Menteriya yakni Viktor Orban, Hungaria mulai mengeluarkan pernyataannya dalam merespon sanksi energi. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa Hungaria memilih menolak sanksi energi Uni Eropa ke Rusia, pernyataan tersebut diunggah Orban pada halaman media sosial Facebooknya. Berdasarkan video unggahan tersebut, Hungaria menyarankan bahwa Uni Eropa sebaiknya tidak menjatuhkan sanksi energi terhadap Rusia, terutama terkait sanksi gas atau minyak Rusia (Fernandez, 2022). Penolakan terhadap sanksi energi merupakan pilihan paling rasional yang mampu dipilih oleh Hungaria pada situasi konflik yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan pasokan energi di wilayah Eropa, khususnya ke Hungaria.

Pada perhitungan atau pertimbangannya, penolakan sanksi lebih menjamin keberlangsungan keamanan energi Hungaria dibandingkan dengan menerima sanksi energi. Menolak sanksi energi setidaknya membuat Hungaria tidak kehilangan pasokan energi utamanya. Pasokan energi dan kerja sama dengan Rusia akan tetap berlanjut, sehingga keamanan ekonomi negara yang bergantung pada stabilitas pasokan energi akan terkendali. Sejauh ini, pilihan untuk menolak sanksi energi ini adalah pilihan terbaik yang dapat dipilih Hungaria. Meski konsekuensinya Hungaria mendapat kritikan dari negara anggota Uni Eropa yang lain dan disebut sebagai negara Uni Eropa yang pro Rusia. Hungaria dinilai lebih mendukung Rusia pada perang yang menghancurkan Ukraina.

Hungaria mengambil tindakan yang sifatnya individual dengan mengimpor energi di tengah sanksi energi (Neely & Sithole-Matarise, 2022). Sebagai negara yang membutuhkan energi, Hungaria tentu tidak dapat memilih pilihan lain selain terus memasok energi dari Rusia dengan mengabaikan pandangan atau kritikan pihak lain karena tindakannya. Memasok energi dari Rusia tidak membuat Hungaria mengalami ancaman krisis energi dibandingkan dengan menerima sanksi yang akhirnya dapat membatasi ketersediaan energi Hungaria yang berujung pada krisis dan resesi. Pilihan untuk terus memasok energi adalah pilihan yang memberikan Hungaria keuntungan yang maksimal dalam situasi dilema yang tengah dihadapi.

Tindakan penolakan Hungaria didukung oleh aktor pemerintah Hungaria yang lain, yakni Balazs Orban seorang direktur politik Perdana Menteri Hungaria yang menyampaikan bahwa "*At the end of the day Europe will be on the losing side of this war because of the economic problems. Our recommendation would be that we should stop the sanction process*" (Strupczewski, 2022). Keamanan energi Hungaria yang rentan karena ketergantungan pada impor energi membuat pilihan penolakan terhadap sanksi energi adalah tindakan yang paling tepat yang dapat dipilih Hungaria. Tindakan penolakan Hungaria bukanlah tindakan yang mendukung konsensus atau merujuk pada keselarasan ataupun kesetaraan dalam tindakan pada sebuah organisasi regional besar seperti Uni Eropa. Hungaria bertindak secara bertolak belakang dengan apa yang disetujui oleh negara anggota Uni Eropa yang lain. Sebab, Hungaria bergerak secara terstruktur yang hanya menyediakan satu pilihan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Hungaria terus

berjuang untuk menemukan sebuah cara untuk melakukan tindakan secara optimal. Menolak dan merekomendasikan penghentian sanksi ke Rusia adalah tindakan yang dipilih Hungaria untuk menjaga keamanan negaranya dari dampak perang yang mengancam keamanan energinya.

PENYEBAB PENOLAKAN HUNGARIA TERHADAP SANKSI ENERGI UNI EROPA KE RUSIA

Hungaria telah menjadi hambatan utama bagi kebulatan suara terkait sanksi energi Rusia. Sanksi pada sektor energi yang berisi tentang penghentian impor minyak Rusia akan memukul ekonomi negara yang terkurung daratan seperti Hungaria, karena tidak dapat dengan mudah mendapatkan minyak dari tempat lain dengan harga yang terjangkau (Abnett, 2022). Perdana menteri Hungaria menambahkan bahwa embargo Uni Eropa atas impor gas Rusia akan menghancurkan ekonomi Eropa yang sudah bergulat dengan lonjakan inflasi karena harga energi yang semakin tinggi (Szakacs, 2022). Hal tersebut merupakan gambaran beberapa alasan atau penyebab Hungaria menolak sanksi energi. Lebih detail, terdapat beberapa penyebab lainnya yang mempengaruhi tindakan Hungaria untuk menolak sanksi energi, yakni karena adanya ketergantungan energi dan penolakan tersebut merupakan upaya Hungaria dalam menjaga keamanan energi negaranya. Sebagai sebuah negara, Hungaria memiliki tanggung jawab dalam memastikan tercapainya kepentingan nasional negaranya serta memastikan keamanan negaranya, termasuk keamanan energi. Masa kontemporer ini telah menunjukkan urgensi isu energi bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan negara.

Kerja Sama Hungaria dan Rusia

Hubungan kedekatan Hungaria dan Rusia juga dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi lunaknya tindakan Hungaria dalam merespon perang yang menghancurkan Ukraina. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban, Hungaria memupuk hubungan yang dekat dengan Rusia. Kebijakan Hungaria berupa *Eastern Opening Policy* atau EOP memperjelas terbukanya hubungan Hungaria dengan negara-negara timur, terutama dengan Rusia. Kerja sama dengan Rusia menjadi bagian penting dari wacana publik Hungaria dan kebijakan luar negeri pemerintah Hungaria sejak 1998 (Istrate, 2021).

Hungaria menjadi salah satu dari sebagian kecil negara Uni Eropa yang menjalin hubungan erat dengan Rusia. Hubungan yang terjalin tentu berlandaskan atas kepentingan masing-masing negara. Pada kasus ini kepentingan terhadap pasokan energi dari Rusia menjadi salah satu alasan yang menguatkan condongnya Hungaria bekerja sama dengan Rusia. Pada awalnya, hubungan untuk mempertahankan dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara didasarkan pada ketergantungan energi Hungaria pada Rusia. Mengingat Hungaria memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya melalui pasokan energi dari Rusia. Menurut data IEA, Hungaria menerima lebih dari setengah impor minyak mentah dan produk minyaknya dari Rusia tahun 2021 lalu (Guarascio & Chalmers, 2022). Kedekatan Hungaria dan Rusia membuat kedua pihak menjalin berbagai kerja sama, terutama kerja sama di sektor energi. Pada tanggal 14 Januari 2014, Perdana Menteri Hungaria dan Presiden Rusia menandatangani kesepakatan pembangunan dua blok nuklir baru, sebagai tambahan untuk satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Hungaria (Istrate, 2021). Raksasa energi Rusia (Rosatom) menjadi kontraktor utama untuk proyek pembangunan tersebut. Termasuk perjanjian keuangan awal yang

diumumkan di Moskow yakni pinjaman Rusia senilai €10 miliar, mencakup 80% biaya proyek, yang akan dilunasi selama 21 tahun dari tahun 2026.

Menyusul kesepakatan pemerintah Hungaria-Rusia tentang proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Paks pada awal 2014, Orbán dan Putin setuju untuk mengadakan negosiasi tahunan sesudahnya untuk memantau kemajuan yang dibuat dalam hubungan ekonomi. Sejak keputusan mereka untuk memajukan hubungan bilateral, konsultasi telah diadakan antara Perdana Menteri Hungaria dan Presiden Rusia (di Ibu Kota Hungaria Budapest atau Moskow). Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, namun Hungaria memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Rusia. Hal tersebut menandai puncak baru dalam hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Sejak kesepakatan tersebut, kedua negara mengadakan KTT setiap tahun yang dimulai pada tahun 2015. Setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan setiap tahunnya membahas terkait hubungan antar keduanya.

Hungaria menjaga hubungan baik dengan Rusia karena kepentingan yang dimiliki. Hungaria juga telah menandatangani perjanjian pasokan gas selama 15 tahun dengan grup energi Rusia Gazprom untuk berlaku segera setelah kesepakatan yang ada (Stonestreet, 2021). Terlihat dalam hal ini bahwa Hungaria terus memperbaharui kerja sama dengan Rusia. Di bawah kepentingan Hungaria yang mengandalkan Rusia untuk sebagian besar impor gas alamnya dengan akses yang mudah melalui pipa. Karena memasok energi melalui pipa adalah saluran yang lebih mudah dan murah bagi Hungaria yang tidak memiliki kawasan laut. Meskipun hubungan Rusia dan Uni Eropa memburuk akibat adanya perang, hal tersebut tidak mengurangi tingkat kerja sama Hungaria dengan Rusia. Hungaria menolak berbagai macam sanksi yang terkait dengan sanksi energi Rusia dan tetap melakukan transaksi energi dengan Rusia. Misalnya saat Peter Szijjarto pada tanggal 7 April 2022, menginformasikan bahwa Hungaria telah menerima pengiriman pertama bahan bakar nuklir melalui udara dari Rusia untuk pembangkit nuklir Paks Hungaria (Neely & Sithole-Matarise, 2022).

Ketergantungan Energi Hungaria terhadap Energi Rusia

Negara yang mengalami ketergantungan energi adalah negara yang posisinya sulit mandiri akibat kebutuhan energinya bergantung pada impor dari negara lain atau negara yang memegang kendali atas keamanan ekonominya, dalam hal ini pada segi keamanan energi. Ketergantungan diartikan sebagai sebuah hubungan yang terjalin antar negara importir (yang mengalami ketergantungan energi) dengan negara eksportir. Hungaria menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang sangat bergantung pada keberadaan energi. Kendala yang dihadapi Hungaria sebagai negara *lockland* mempengaruhi Hungaria untuk mempertahankan sumber pasokan energi utamanya, yakni Rusia meski konsekuensinya adalah dinilai sebagai negara anggota yang pro terhadap tindakan agresif Rusia ke Ukraina.

Sebagai negara *lockland* Hungaria bergantung pada pasokan energi melalui pipa. Sehingga tidak mudah bagi Hungaria untuk mendapatkan pasokan energi selain dari Rusia. Sebab, infrastruktur pasokan energi Hungaria lebih banyak terhubung dengan Rusia. Memasok energi dari negara lain akan membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi bagi Hungaria, karena membutuhkan pembangunan atau pembaharuan infrastruktur. Pilihan membeli energi dari negara lain melalui transportasi laut justru membutuhkan lebih banyak biaya karena Hungaria

tidak memiliki kawasan laut. Kehilangan Rusia sebagai pasokan energi utama akan membawa masalah yang sangat kompleks bagi keamanan energi dan keamanan nasional Hungaria.

Proedrou berpendapat dalam bukunya bahwa keamanan energi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari negara pengimpor dan negara pengeksport. Negara pengimpor adalah negara yang dominan mengalami ketergantungan energi karena keamanan energi negaranya difokuskan pada akses terhadap sumber energi (*access to resources*) dan keamanan terhadap pasokan energi (*energy security of supply*) (Proedrou, 2012). Negara pengeksport adalah negara yang tidak mengalami kekurangan energi dan tidak bergantung pada pasokan energi dari negara lain. Sehingga, Hungaria dapat dikategorikan sebagai negara yang mendefinisikan keamanan energi dari sudut pandang negara importir. Hungaria mengalami ketergantungan energi karena bergantung pada pasokan energi dari beberapa negara dan Rusia mendominasi pasokan energi di Hungaria.

Menyetujui sanksi energi bagi Hungaria akan berdampak pada terputusnya Hungaria dengan akses pasokan energinya. Kehilangan pasokan energi bagi sebuah negara akan menggiring negara tersebut mengalami krisis hingga resesi ekonomi. Hal tersebut adalah keadaan yang tengah dihindari Hungaria dalam upaya penolakan yang dilakukan. Instabilitas keamanan energi akan menggiring Hungaria ke dalam krisis ekonomi yang berdampak pada krisis insani (Ramadhani, 2017). Saat ini, keamanan energi tidak lagi berbicara untuk keperluan perang atau komoditas militer, tetapi saat ini keamanan energi telah menyinggung keamanan manusia dan berlangsungnya sebuah negara.

Kegiatan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat saat ini telah dimanjakan oleh pemanfaatan energi sebagai sebuah terobosan kemudahan aktivitas sehari-hari. Seperti penggunaannya dalam sektor industri, transportasi, kegiatan rumah tangga, pertanian/kehutanan, komersial, hingga pelayan publik pun menggunakan energi. Sehingga, apabila terjadi kelangkaan energi akibat hilangnya pasokan utama energi (Rusia) akan berdampak pada kacaunya berbagai sektor di atas, diiringi dengan melonjaknya harga pangan, barang, dan jasa. Kepentingan Hungaria dalam tindakan penolakannya adalah untuk menjaga keamanan pasokan energi negaranya. Sebagai negara yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengakses dan mendapatkan pasokan energi menggiring Hungaria untuk tegas menolak sanksi. Terlebih Hungaria memiliki kemudahan dalam mengakses pasokan energi dengan biaya yang terjangkau pada energi Rusia. Sebagaimana IEA mendefinisikan bahwa keamanan energi adalah kondisi suatu negara memiliki ketersediaan energi yang cukup secara terus menerus dengan harga yang terjangkau.

Ketidakmampuan Hungaria dalam memenuhi kebutuhan energi negara dari hasil produksi domestiknya mendorong Hungaria melakukan impor energi. Hal tersebut merupakan upaya Hungaria sebagai sebuah negara dalam memenuhi permintaan konsumsi domestiknya atau upaya menjaga keamanan energinya. Oleh sebab itu, Hungaria tergolong ke dalam negara yang mengalami ketergantungan energi, karena bergantung pada impor energi negara asing, terutama dari Rusia. Misalnya dengan mengimpor batu bara karena keterbatasan jenis energi yang dapat diproduksi Hungaria. Berdasarkan data produksi batu bara yang dilakukan Hungaria di website IEA, sejak tahun 1993 Hungaria hanya memproduksi batu bara jenis lignite atau batu bara muda. Sedangkan hingga tahun 2020, Hungaria menggunakan berbagai jenis batu bara, seperti Coke

oven coke, BKB, Coke oven gas, Batu bara bituminus lainnya, Coal tar, dan Anthracite (*Hungary, 2022*). Selama tahun 2016 hingga 2020, jumlah rata-rata penggunaan energi batu bara Hungaria sebanyak 10.880 TJ. Oleh karena itu, Hungaria terhitung melakukan impor batu bara dengan jumlah yang cukup banyak selama 5 tahun terakhir dengan jumlah rata-rata 46.796 TJ sepanjang tahun 2016 hingga 2020.

Hungaria juga mengimpor energi jenis gas alam. Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah rata-rata konsumsi gas alam Hungaria menyentuh angka 284.483,2 TJ. Jumlah rata-rata konsumsi energi gas alam Hungaria tersebut tergolong cukup tinggi. Namun, data produksi gas alam Hungaria mengalami penurunan dari beberapa tahun lalu. Hingga jumlah rata-rata produksi gas alam Hungaria hanya mencapai 64.711,2 TJ-gross. Dengan jumlah produksi yang rendah, kebutuhan energi gas alam Hungaria yang cukup tinggi tidak dapat terpenuhi. Sehingga, satu-satunya cara yang dapat ditempuh negara seperti Hungaria adalah dengan melakukan impor. Jumlah impor gas alam Hungaria mengalami dinamika yang cukup signifikan, menurut data terakhir pada tahun 2020 impor gas alam mengalami penurunan, namun masih berkisar pada jumlah yang tinggi. Dengan nilai rata-rata sebanyak 509.642,8 TJ-gross dari tahun 2016-2020. Net impor gas alam Hungaria menunjukkan bahwa Rusia adalah pasokan utama gas alam Hungaria hingga saat ini. Rusia menyuplai kebutuhan gas Hungaria sebanyak 85%. Data tahun 2000-2020 menunjukkan bahwa Rusia mendominasi impor gas alam ke Hungaria. Ketergantungan Hungaria sebanyak 85% gas Rusia menjadi salah satu alasan kuat penolakan Hungaria terhadap sanksi energi Rusia (*Than, 2022*).

Selain batu bara dan gas alam, Hungaria juga bergantung pada pasokan energi minyak dari negara lain. Data tahun 2020 menunjukkan Hungaria mengkonsumsi minyak di berbagai sektor. Sektor transportasi menjadi sektor dengan konsumsi minyak terbesar dengan angka 167.290 TJ. Diikuti dengan penggunaan minyak sebagai *non-energy* sejumlah 73.606 TJ, sektor industri sebanyak 30.140 TJ, sektor pertanian/kehutanan sebanyak 17.256 TJ, di sektor perumahan sebanyak 3.312 TJ, sektor komersial dan pelayanan publik sebanyak 1.454 TJ, terakhir di sektor perikanan sebanyak 85 TJ (*Hungary, 2022*). Rata-rata jumlah konsumsi minyak Hungaria pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah 288.612,6 TJ. Data menunjukkan bahwa jumlah produksi minyak Hungaria tidak melebihi jumlah data konsumsi minyak Hungaria. Rata-rata jumlah produksi minyak Hungaria berkisar pada angka 44.530,8 TJ. Jika dibandingkan dengan jumlah konsumsi atau jumlah kebutuhan minyak Hungaria menurut data yakni sebanyak 288.612,6 TJ, maka jumlah produksi minyak Hungaria tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga, kembali lagi Hungaria harus melakukan impor minyak dari negara lain. Impor minyak mentah Hungaria juga berasal dari berbagai negara seperti Rusia, Iraq, Slovenia, Serbia, Kroasia, Kazakhstan, Austria, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Dari tahun 2000 menurut data IEA, Rusia sudah menjadi pemasok minyak mentah utama Hungaria. Net impor minyak mentah Rusia ke Hungaria dari tahun 2016-2020 terhitung jumlah rata-ratanya sebanyak 87,76 kb/d (*Hungary Oil Security Policy, 2022*).

Data yang tercantum pada *website* IEA menunjukkan bahwa Hungaria juga menggunakan dan mengimpor produk minyak. Produk minyak adalah produk minyak bumi seperti bensin, sulingan seperti bahan bakar diesel dan minyak pemanas, bahan bakar jet, bahan baku petrokimia, lilin, minyak pelumas, dan aspal (*Produk Minyak Dan Minyak Bumi Menjelaskan, 2023*). Produk minyak ini juga digunakan pada berbagai sektor seperti transportasi, perumahan,

industri, pertanian/kehutanan, dan lain sebagainya. Jumlah rata-rata penggunaan produk minyak di Hungaria dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 242.239,2 TJ. Konsumsi produk minyak sangat terkonsentrasi di sektor transportasi dan industri, dengan penggunaan yang paling rendah adalah untuk pembangkit listrik.

Kegiatan impor produk minyak Hungaria mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni dari 131.549 di tahun 2020 menjadi 151,055 TJ. Hungaria mencoba memenuhi kebutuhan produk minyak negaranya dengan melakukan impor. Jumlah rata-rata impor produk minyak di Hungaria sebanyak 144.787,9 TJ dari tahun 2016 hingga tahun 2020 (*Hungary Oil Security Policy, 2022*). Hungaria merupakan pengimpor bersih produk minyak dan diperkirakan akan tetap demikian dalam jangka menengah dengan pertumbuhan permintaan yang cenderung melebihi produksi lokal hingga setidaknya tahun 2025. Net impor produk minyak Hungaria juga didominasi oleh impor dari negara Rusia. Sejak tahun 2002, Rusia telah menjadi salah satu negara yang memasok produk minyak ke Hungaria. Hingga tahun 2020, Rusia telah menempati posisi vital dalam pasokan produk minyak Hungaria. Sehingga, akan sulit bagi Hungaria untuk memutuskan ketergantungannya terhadap pasokan energi Rusia dalam waktu yang singkat dan dengan dana yang terbatas. Pada tahun 2021, impor produk minyak Hungaria mengalami peningkatan, yakni sejumlah 71,881 TJ. Sedangkan eksportnya mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari angka -26,996 menjadi -25,963 TJ.

Selanjutnya, terkait penggunaan energi nuklir Hungaria. Nuklir merupakan bahan utama pembangkit listrik dan panas Hungaria, urgensi nuklir inilah yang mendorong Hungaria juga menyuplai nuklir. Pada tahun 2021 Hungaria menyuplai nuklir sebanyak 174.824 TJ nuklir (*Hungary, 2022*). Sebagian besar nuklir yang didapatkan Hungaria bersumber dari hasil proyek Paks II yang merupakan proyek Hungaria yang disokong bantuan Rusia. Sehingga, dalam hal ini Hungaria juga mengalami ketergantungan terhadap energi Rusia baik energi yang diimpor langsung dari Rusia maupun bantuan atau investasi energi oleh Rusia.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa energi menyokong hampir seluruh kegiatan warga negara Hungaria. Hungaria menjadi salah satu negara yang bergantung pada ketersediaan energi untuk mencapai kesejahteraan hidup warga negaranya. Hal ini ditunjukkan pada besaran data terkait konsumsi energi yang dilakukan Hungaria. Data produksi menunjukkan, jumlah energi yang mampu dihasilkan Hungaria dalam upayanya memenuhi kebutuhan energi. Data secara dominan menunjukkan, jumlah energi yang mampu diproduksi Hungaria masih rendah, sehingga tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi yang tergolong tinggi. Sedangkan, data pasokan atau impor energi menunjukkan kerentanan keamanan energi Hungaria yang masih bergantung pada kegiatan impor energi yang dilakukan pada beberapa negara, termasuk Rusia yang menjadi salah satu pemasok energi terbesar Hungaria.

Data-data yang terhimpun dalam *website* IEA menunjukkan bahwa konsumsi dan tingkat impor energi yang dilakukan masih cukup tinggi. Atas adanya ketergantungan energi yang dimiliki, Hungaria menjadi salah satu negara Uni Eropa yang menjalin hubungan dekat dengan Rusia. Sebagai negara yang terkurung daratan, Hungaria saat ini sangat bergantung pada Rusia untuk impor batu bara, gas alam, minyak, dan bahan bakar nuklir serta investasi nuklir baru. Hungaria dan Rusia bahkan tengah memiliki proyek bersama yakni pembangunan reaktor nuklir

di Hungaria. Beberapa alasan tersebut telah menggambarkan mengapa Hungaria menolak paket sanksi terhadap Rusia yang mencakup larangan impor minyak Rusia, bahkan Hungaria menegosiasikan pengecualian diberlakukannya sanksi tersebut untuk negaranya.

KESIMPULAN

Keamanan energi menjadi suatu isu vital bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara. Kemajuan zaman menjadi zaman modern mendukung seluruh aktivitas manusia menggunakan teknologi yang disokong dengan keberadaan energi, mulai dari transportasi, pelayanan publik, industri hingga keperluan rumah tangga. Kemudahan akibat teknologi membuat manusia terbiasa hidup dengan segala sesuatu yang cepat dan mudah. Sehingga, teknologi menjadi suatu hal yang candu bagi manusia saat ini. Teknologi disokong dengan adanya energi sebagai daya penggerak. Ketersediaan energi menjadi kunci bagi keberadaan teknologi. Sehingga, berdasarkan kebutuhan teknologi, isu keamanan energi menjadi salah satu isu vital dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

Sumber energi setiap negara berbeda-beda, ada negara yang memiliki sumber energi dalam negaranya dan ada negara yang membutuhkan pasokan energi dari negara lain karena negaranya tidak memiliki sumber energi. Sumber energi terutama energi fosil tidak bisa didapatkan disemua tempat dan memiliki kuantitas atau jumlah yang terbatas. Hungaria mendapatkan ketersediaan energinya melalui impor dari beberapa negara, namun didominasi oleh impor energi dari Rusia. Berdasarkan data jumlah impor negara Hungaria, Hungaria memiliki ketergantungan terhadap pasokan energi dari Rusia. Ketergantungan energi di Hungaria terjadi karena jumlah produksi energi domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan energi negaranya, sehingga Hungaria melakukan import energi.

Adanya ketergantungan energi yang dialami Hungaria terhadap Rusia membuat Hungaria menolak segala sanksi Uni Eropa terhadap energi Rusia. Sanksi energi menjadi ancaman bagi keamanan energi Hungaria. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat pemerintahan Hungaria, ketergantungan dan keamanan energi menjadi alasan atau penyebab utama penolakan yang dilakukan Hungaria terhadap sanksi energi Uni Eropa. Hungaria enggan mengimplementasikan sanksi dan meminta pengecualian terhadap negaranya untuk menerapkan sanksi tersebut. Dalam hal ini bagi Hungaria, kerja sama dengan Rusia lebih berarti dibandingkan mendukung konsensus pemberian sanksi Uni Eropa ke Rusia.

Tindakan dan kebijakan penolakan Hungaria didasarkan pada perhitungan yang rasional. Hungaria mempertimbangkan hasil yang akan didapatkan apabila menerima dan menolak sanksi terhadap energi Rusia. Menerima sanksi energi Rusia bagi Hungaria hanya akan mengancam ketersediaan pasokan energi atau keamanan energi negaranya. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi Hungaria, berupa krisis energi. Krisis energi menggambarkan kondisi suatu negara yang mengalami kekurangan pasokan energi ke sektor ekonomi yang berakibat pada krisis ekonomi dan resesi. Ketidakstabilan ekonomi akan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan pasokan makanan. Sedangkan untuk melakukan pemulihan ekonomi negara yang anjlok akibat krisis membutuhkan waktu panjang dengan upaya yang maksimal.

Penolakan terhadap sanksi energi kemudian menjadi pilihan terbaik bagi Hungaria untuk terhindar dari krisis energi yang berdampak pada krisis ekonomi. Penolakan membuat posisi

Hungaria lebih menguntungkan dengan tidak kehilangan akses terhadap pasokan energinya. Meski menjadi salah satu negara kecil di Uni Eropa, Hungaria sejauh ini telah menjadi negara yang cukup diperhatikan karena penolakannya terhadap Uni Eropa dalam beberapa isu, seperti isu migrasi, *lesbian, gay, biseksual*, dan *transgender* (LGBT), standar demokrasi, hingga saat ini penolakannya terhadap sanksi energi Uni Eropa. Fenomena ini menunjukkan Uni Eropa sebagai organisasi regional dinilai tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kepentingan seluruh negara anggotanya. Sehingga, negara anggota memilih untuk menentukan kebijakannya sendiri meskipun bertentangan dengan kebijakan di tingkat Uni Eropa.

REFERENCES

- Abnett, K. (2022, May 30). Explainer: Why is the EU struggling to agree Russian oil sanctions? *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/why-is-eu-struggling-agree-russian-oil-sanctions-2022-05-30/>
- Alasan Rusia Ingin Menyerang Ukraina. (2022, February 16). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220215180351-134-759575/alasan-rusia-ingin-menyerang-ukraina>.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Energy security Ensuring the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price*. (n.d.). International Energy Agency. Retrieved January 31, 2023, from <https://www.iea.org/areas-of-work/ensuring-energy-security>
- EU response to Russia's invasion of Ukraine*. (2023). European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/>
- EU sanctions against Russia explained*. (2023). European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>
- Fahmy, I. A. (2023). 6 Perbedaan Penelitian Eksploratif, Deskriptif, dan Eksplanatif Beserta Contohnya. *Pinhome*. <https://www.pinhome.id/blog/perbedaan-penelitian-eksploratif-deskriptif-eksplanatif/>
- Fernandez, C. (2022, March 11). Hungary PM Orban says EU will not sanction Russian gas or oil. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/hungary-pm-orban-says-eu-will-not-sanction-russian-gas-or-oil-2022-03-11/>
- Geologinesia. (2020). *Profil Negara Hongaria [+Gambar Peta Lengkap]*. <https://www.geologinesia.com/2020/01/profil-negara-hongaria.html>
- Guarascio, F., & Chalmers, J. (2022, May 4). EU's toughest Russia sanctions yet snag on worries over oil ban. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/eu-lay-out-new-sanctions-russia-targeting-oil-imports-2022-05-04/>
- Hungary*. (2022). International Energy Agency. <https://www.iea.org/countries/hungary>
- Hungary Oil Security Policy*. (2022). International Energy Agency.

<https://www.iea.org/articles/hungary-oil-security-policy>

- Ismail, A. (2016). *Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional : Resensi Buku* (Vol. 5, Issue 1). Pustaka Ilmu Group.
- Istrate, D. (2021). *Russian Influence in Hungary : The Case Of Paks 2 and the Kremlin'S Seeking Efforts Through Nuclear*.
- Kolodkin, B. (2019). *Examples of Sanctions in International Relations*. ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/what-are-sanctions-3310373>
- Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1).
- Müller, P., Pomorska, K., & Tonra, B. (2021). The Domestic Challenge to EU Foreign Policy-Making: From Europeanisation to de-Europeanisation? *Journal of European Integration*, 43(5), 519–534. <https://doi.org/10.1080/07036337.2021.1927015>
- Neely, J., & Sithole-Matarise, E. (2022, April 7). Hungary receives nuclear fuel from Russia by air -foreign minister. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/hungary-receives-nuclear-fuel-russia-by-air-foreign-minister-2022-04-07/>
- Ogu, M. I. (2013). Rational Choice Theory : Assumptions , Strengths , and Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context. *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(3), 90–99. <https://doi.org/10.12816/0003628>
- Produk minyak dan minyak bumi menjelaskan*. (2023). U.S. Energy Information Administration. <https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/>
- Proedrou, F. (2012). *EU Energy Security in the Gas Sector: Evolving Dynamics, Policy Dilemmas and Prospects*. Ashgate Publishing Limited.
- Ramadhani, A. (2017). Evolusi Konsep Keamanan Energi. *Jurnal Politik Internasional*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.307>
- Rinayuhani, T. R. (2017). Rational Choice Dalam Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Pt. Freeport Indonesia. *Jurnal Politik Universitas Nasional*, 13(1), 1920–1927.
- Salmaa. (2023, March 17). Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh. *Deepublish*. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>
- Stonestreet, J. (2021, June 3). Hungary agrees 15-year gas deal with Gazprom -foreign minister. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-15-year-gas-deal-with-gazprom-foreign-minister-2021-05-28/>
- Strupczewski, J. (2022, June 24). No more EU sanctions on Russia needed, negotiations better option -Hungary. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/no-more-eu-sanctions-russia-needed-negotiations-better-option-hungary-2022-06-23/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (Ed.); 3rd ed.). ALFABETA.

Szabo, J., Weiner, C., & Deak, A. (2021). Energy Governance in Hungary. In *Handbook of Energy Governance in Europe*. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73526-9_3-1

Szakacs, G. (2022, June 10). Hungary price caps could stay in place if war is entrenched, Orban says. *Reuters*.

Than, K. (2022, July 23). Orban urges new EU strategy on Ukraine, says sanctions have failed. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-orban-calls-new-eu-strategy-ukraine-war-says-sanctions-failed-2022-07-23/>

Uni Eropa. (2018). Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Brussel Belgia. <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu#:~:text=Negara Anggota%3A 27 negara%3A Austria, Spanyol%2C Swedia%2C dan Yunani.>